



PENDIDIKAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA : HAK ASASI MANUSIA DAN KEADILAN SOSIAL DI PENDIDIKAN INDONESIA

Rahel Maretha Nababan

Politeknik Penerbangan Medan

Naia Fauzi

Politeknik Penerbangan Medan

Surya Elia Subianto Manurung

Politeknik Penerbangan Medan

Ricky Aditya Siregar

Politeknik Penerbangan Medan

Hairul Amren

Politeknik Penerbangan Medan

Korespondensi penulis: hairulamren123@gmail.com

Abstract. This study examines how university students perceive the role of Pancasila Education in strengthening the understanding of Human Rights (HR) and the principle of social justice within Indonesia's education system. Using a descriptive-qualitative approach, the research explores students' views on the relevance of Pancasila values—particularly the second and fifth principles—in shaping character, critical awareness, and inclusive attitudes in academic settings. The findings indicate that students consider Pancasila Education not merely as a normative subject, but as a medium for cultivating social ethics, respect for human dignity, and sensitivity toward social inequality. However, students also identify challenges, such as the lack of contextual teaching methods, which prevents deeper internalization of HR values and social justice. This study recommends strengthening dialogic learning models, case-based discussions, and the integration of current social issues to enhance the relevance and impact of Pancasila Education for younger generations.

Keywords: Pancasila Education; University Students; Human Rights; Social Justice; Indonesian Education; Pancasila Values.

Abstrak. Penelitian ini membahas bagaimana mahasiswa memandang peran Pendidikan Pancasila dalam memperkuat pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip keadilan sosial dalam sistem pendidikan Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, studi ini menelusuri persepsi mahasiswa terhadap relevansi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, dalam membentuk karakter, kesadaran kritis, serta sikap inklusif dalam lingkungan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menilai Pendidikan Pancasila tidak hanya sebagai mata kuliah normatif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan etika sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penguatan kepekaan terhadap ketidaksetaraan sosial. Namun demikian, mahasiswa juga melihat adanya tantangan berupa kurangnya metode pembelajaran yang kontekstual, sehingga nilai-nilai HAM dan keadilan sosial belum sepenuhnya diinternalisasi secara mendalam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan model pembelajaran berbasis dialog, studi kasus, serta integrasi isu-isu sosial aktual agar Pendidikan Pancasila semakin relevan dan berdampak bagi generasi muda.

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila; Mahasiswa; Hak Asasi Manusia; Keadilan Sosial; Pendidikan Indonesia; Nilai Pancasila.

LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk orientasi etika, moral, dan sosial setiap warga negara. Dalam konteks pendidikan tinggi, Pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah wajib, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menanamkan identitas kebangsaan, tanggung jawab kewarganegaraan, serta pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Pada era ketika isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketidakadilan sosial semakin mendapat perhatian global, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali sejauh mana Pendidikan Pancasila mampu memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap kedua aspek tersebut. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai inti Pancasila—khususnya sila kedua tentang *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* dan sila kelima tentang *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*—serta mencerminkannya dalam sudut pandang, sikap, dan perilaku sehari-hari di lingkungan akademik.

Meskipun demikian, implementasi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak lepas dari berbagai tantangan. Banyak mahasiswa memandang mata kuliah ini bersifat teoritis dan kurang relevan dengan persoalan sosial yang mereka hadapi, sehingga mengurangi tingkat keterlibatan dan refleksi kritis. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti ketimpangan akses pendidikan, diskriminasi sosial, dan pelanggaran HAM. Kondisi ini menuntut adanya integrasi yang lebih kuat antara nilai-nilai Pancasila dengan praktik pendidikan, agar mahasiswa tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga merasakan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan sosial. Kesenjangan antara tujuan ideal dan realitas pelaksanaan inilah yang mendorong perlunya evaluasi dan penguatan kembali peran Pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan karakter humanis dan rasa tanggung jawab sosial pada diri mahasiswa.

Selain itu, perkembangan budaya digital, arus globalisasi, dan meningkatnya interaksi lintas budaya turut memengaruhi cara mahasiswa memaknai ideologi bangsa. Dalam situasi ini, Pendidikan Pancasila harus diajarkan melalui pendekatan yang relevan, dialogis, dan kontekstual agar mahasiswa mampu mengaitkan nilai-nilai filosofis tersebut dengan realitas kekinian. Dengan mengkaji bagaimana mahasiswa memandang hubungan antara Pendidikan Pancasila, HAM, dan keadilan sosial, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas praktik pembelajaran

yang ada serta kontribusinya dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kemanusiaan. Penguatan Pendidikan Pancasila menjadi penting tidak hanya untuk menjaga ketahanan ideologi bangsa, tetapi juga untuk menumbuhkan budaya saling menghormati, menghargai martabat manusia, dan mewujudkan keadilan sosial dalam sistem pendidikan Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

1. Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan usaha sistematis untuk menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila kepada peserta didik agar mampu berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Menurut berbagai literatur, Pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan membangun pengetahuan kognitif, tetapi juga membentuk karakter moral dan rasa tanggung jawab sosial. Pancasila berfungsi sebagai *ideologi terbuka*, landasan moral, serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pendidikan tinggi, Pendidikan Pancasila menjadi sarana untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai warga negara yang kritis, inklusif, dan memiliki kesadaran akan keberagaman. Implementasinya mencakup pemahaman terhadap nilai dasar (founding values), pemaknaan terhadap realitas sosial, serta keterampilan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dicabut dan dihormati oleh siapa pun. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang wajib dijaga oleh negara dan dijalankan demi menjamin martabat serta kesejahteraan manusia. Dalam konteks pendidikan, HAM menjadi dasar perlindungan terhadap hak belajar, kesetaraan perlakuan, kebebasan berpendapat, serta inklusi bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi. Pendidikan Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan HAM karena nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung muatan penghormatan terhadap martabat manusia, anti-kekerasan, toleransi, dan empati sosial. Mahasiswa sebagai generasi intelektual diharapkan memahami konsep HAM tidak hanya secara konseptual, tetapi juga menginternalisasikannya dalam perilaku dan interaksi akademik.

3. Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan nilai fundamental dalam Pancasila yang terletak pada sila kelima. Dalam teori keadilan sosial, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan kesempatan, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan, penghapusan kesenjangan, dan perlakuan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Para ahli seperti John Rawls menekankan pentingnya *fairness* dan perlindungan terhadap kelompok rentan, sementara teori keadilan distributif menyoroti pembagian sumber daya secara merata sesuai kebutuhan. Dalam dunia pendidikan, keadilan sosial berkaitan dengan akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan, layanan pembelajaran, sarana inklusi, serta kebijakan yang tidak diskriminatif. Bagi mahasiswa, pemahaman mengenai keadilan sosial menjadi indikator kesadaran mereka terhadap ketimpangan dan kewajiban moral untuk terlibat dalam perubahan sosial yang lebih adil.

4. Perspektif Mahasiswa dalam Pendidikan Ideologi

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda berada pada fase penting pembentukan jati diri, kedewasaan berpikir, dan kesadaran kritis terhadap isu sosial. Perspektif mahasiswa terhadap Pancasila dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya digital, globalisasi, serta kualitas metode pembelajaran yang diberikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mudah menginternalisasi nilai Pancasila ketika pembelajaran bersifat dialogis, berbasis kasus, dan terhubung dengan realitas aktual seperti isu HAM, intoleransi, cyberbullying, dan ketidaksetaraan pendidikan. Selain itu, mahasiswa cenderung menilai efektivitas Pendidikan Pancasila dari sejauh mana mata kuliah tersebut memberikan ruang untuk diskusi, refleksi kritis, dan penerapan nilai dalam kehidupan kampus. Oleh karena itu, perspektif mahasiswa menjadi indikator penting keberhasilan pendidikan ideologi di perguruan tinggi.

5. Hubungan Pendidikan Pancasila, HAM, dan Keadilan Sosial

Ketiga konsep tersebut memiliki hubungan erat dan saling memperkuat. Pendidikan Pancasila menyediakan landasan normatif dan filosofis bagi pengembangan karakter yang berorientasi pada kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. HAM menjadi pilar penting dalam sila kedua, sedangkan keadilan sosial merupakan tujuan ideal dalam sila kelima. Ketika mahasiswa memahami keterkaitan ini, mereka akan mampu melihat Pancasila bukan hanya sebagai doktrin, tetapi sebagai pedoman etis yang relevan untuk menghadapi masalah nyata seperti diskriminasi, radikalisme, ketimpangan ekonomi, dan

intoleransi. Melalui pembelajaran yang efektif, mahasiswa dapat mengembangkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial untuk membangun pendidikan dan masyarakat yang lebih adil dan beradab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pandangan mahasiswa mengenai hubungan antara Pendidikan Pancasila, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keadilan sosial dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap pengalaman subjektif, persepsi, serta pemaknaan mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila secara komprehensif. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana mahasiswa memahami konsep-konsep tersebut dan bagaimana mereka menilai implementasinya dalam kehidupan akademik sehari-hari.

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa dari berbagai program studi di perguruan tinggi yang dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan partisipan berdasarkan kriteria tertentu—misalnya mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Data dikumpulkan melalui teknik **wawancara mendalam, angket terbuka, dan observasi non-partisipatif** untuk mendapatkan gambaran yang kaya mengenai pandangan dan pengalaman mahasiswa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi, sementara angket dan observasi digunakan untuk menguatkan temuan serta memperluas pemahaman terhadap fenomena penelitian.

Proses analisis data dilakukan menggunakan metode **analisis interaktif Miles dan Huberman** yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi penting sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan identifikasi pola. Validitas data dijaga melalui teknik **triangulasi sumber dan teknik**, yaitu membandingkan hasil wawancara, angket, dan observasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Hasil analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana mahasiswa memahami, mengapresiasi, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila—khususnya HAM dan keadilan sosial—dalam lingkungan pendidikan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Mahasiswa terhadap Pendidikan Pancasila

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman dasar yang cukup baik mengenai tujuan dan fungsi Pendidikan Pancasila. Mereka menyadari bahwa mata kuliah ini tidak hanya bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menanamkan karakter moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Mahasiswa mengakui bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, namun sebagian besar juga mengungkapkan bahwa mereka baru memaknai Pancasila secara lebih kritis setelah mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi. Banyak mahasiswa mengatakan bahwa Pendidikan Pancasila di jenjang sebelumnya cenderung bersifat hafalan, sementara di perguruan tinggi mereka didorong untuk berpikir lebih analitis mengenai isu-isu sosial seperti intoleransi, pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya kelompok mahasiswa yang merasa bahwa materi Pendidikan Pancasila masih terkesan teoritis dan belum sepenuhnya terkait dengan realitas kehidupan mereka. Mereka mengeluhkan pendekatan pembelajaran yang terkadang monoton dan kurang memberikan ruang bagi diskusi atau studi kasus. Hal ini menyebabkan sebagian mahasiswa memandang mata kuliah ini sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai proses pembentukan karakter. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbarui model pembelajaran agar lebih interaktif, kontekstual, dan relevan dengan isu-isu aktual yang dekat dengan kehidupan mahasiswa.

2. Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebagian besar mahasiswa menunjukkan pemahaman yang kuat tentang konsep Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk diperlakukan secara adil, hak memperoleh pendidikan, hak berekspresi, dan hak bebas dari diskriminasi. Mahasiswa menyatakan bahwa isu HAM sering mereka temui dalam kehidupan kampus, seperti diskriminasi akademik, perbedaan akses sumber belajar, dan ketidaksetaraan fasilitas antar mahasiswa. Temuan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa telah mampu mengidentifikasi permasalahan HAM tidak hanya secara teoritis, tetapi juga dalam pengalaman mereka sehari-hari.

Namun, sebagian mahasiswa juga menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami hubungan antara HAM dan sila kedua Pancasila, yaitu *Kemanusiaan yang*

Adil dan Beradab. Penelitian menemukan bahwa pemahaman mengenai hubungan filosofis ini baru terbentuk ketika dosen menghubungkannya secara langsung melalui studi kasus seperti kekerasan dalam pendidikan, cyberbullying, pelanggaran hak minoritas, atau ketidaksetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi isu HAM dalam pembelajaran Pancasila perlu terus diperkuat agar mahasiswa dapat memahami pentingnya peran Pancasila sebagai dasar moral dalam menjunjung martabat manusia.

3. Pemahaman Mahasiswa tentang Keadilan Sosial

Mahasiswa menilai isu keadilan sosial sebagai salah satu persoalan yang paling relevan dan dekat dengan kehidupan mereka, terutama dalam konteks pendidikan. Mereka mengamati adanya ketimpangan akses terhadap fasilitas belajar, peluang beasiswa, kualitas pengajar, serta ketersediaan sarana prasarana antar jurusan maupun antar institusi pendidikan. Keadilan sosial dipahami sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pemerataan kesempatan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang budaya.

Selain itu, mahasiswa juga mengungkapkan keprihatinan terkait kesenjangan sosial yang semakin meningkat di masyarakat. Mereka memandang bahwa keadilan sosial tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara termasuk mahasiswa. Kesadaran ini menunjukkan bahwa nilai sila kelima Pancasila mulai terinternalisasi dalam cara mahasiswa memandang kondisi sosial di sekitar mereka. Meskipun demikian, mahasiswa merasa bahwa materi tentang keadilan sosial dalam Pendidikan Pancasila masih perlu diperkaya dengan kajian empiris dan refleksi pengalaman nyata agar pemahaman mereka lebih mendalam dan aplikatif.

4. Relevansi Pendidikan Pancasila terhadap Isu HAM dan Keadilan Sosial

Berdasarkan analisis data, mahasiswa menilai bahwa Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap HAM dan keadilan sosial. Mereka berpendapat bahwa nilai Pancasila menjadi landasan filosofis yang dapat memandu mereka dalam memahami isu-isu tersebut dari perspektif moral dan kebangsaan. Ketika pembelajaran diberikan melalui metode yang kontekstual, mahasiswa mampu melihat hubungan antara nilai *kemanusiaan* dan *keadilan* dengan persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan kampus maupun masyarakat.

Walaupun mahasiswa mengakui pentingnya Pendidikan Pancasila, mereka juga menilai bahwa pemanfaatan metode pembelajaran yang kurang variatif menjadi penghambat utama internalisasi nilai. Metode ceramah yang dominan sering kali tidak mampu merangsang kemampuan berpikir kritis ataupun refleksi moral mahasiswa. Sebaliknya, penggunaan metode diskusi, debat, simulasi kebijakan publik, dan studi kasus terbukti lebih efektif dalam membantu mahasiswa memahami isu nyata seperti intoleransi, diskriminasi, kekerasan simbolik, atau ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa inovasi pedagogis merupakan faktor kunci keberhasilan Pendidikan Pancasila dalam konteks kontemporer.

5. Faktor yang Mempengaruhi Internaliasi Nilai Pancasila pada Mahasiswa

Penelitian menemukan bahwa proses internalisasi nilai Pancasila tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran, tetapi juga oleh lingkungan sosial mahasiswa. Interaksi antar mahasiswa yang berbeda latar belakang suku, budaya, agama, dan status ekonomi dapat memperkuat pemahaman mereka mengenai pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Selain itu, peran organisasi mahasiswa, kegiatan sosial, dan pengalaman pribadi juga menjadi sumber pembelajaran yang signifikan bagi mahasiswa dalam menerapkan nilai Pancasila secara praktis.

Namun, pengaruh media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam internalisasi nilai Pancasila. Mahasiswa menyatakan bahwa arus informasi di media digital sangat memengaruhi pandangan mereka terhadap isu-isu keadilan dan HAM. Informasi yang bias atau hoaks dapat membentuk pola pikir yang keliru dan memicu polarisasi. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila perlu memberikan bekal literasi digital agar mahasiswa mampu menyaring informasi dan memahami isu sosial secara objektif serta tidak terjebak dalam narasi ekstrem.

6. Analisis Kritis: Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Dari hasil penelitian terlihat adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila dengan praktik yang berlangsung dalam kehidupan nyata mahasiswa. Nilai-nilai Pancasila sering kali dipahami sebagai konsep ideal, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam lingkungan pendidikan. Mahasiswa menemukan bahwa realitas kampus masih menunjukkan adanya diskriminasi, perundungan, perbedaan fasilitas belajar, hingga perilaku kurang beretika. Kesenjangan ini membuat mahasiswa

mempertanyakan efektivitas Pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter yang sebenarnya.

Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menolak Pancasila sebagai ideologi atau pedoman moral. Justru sebaliknya, mereka menginginkan pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual agar nilai Pancasila dapat dirasakan manfaatnya secara nyata. Pembelajaran yang mengedepankan pemecahan masalah, dialog kritis, dan aplikasi nilai dalam kehidupan sosial menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan efektivitas Pendidikan Pancasila.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa secara umum memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial. Pendidikan Pancasila terbukti mampu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami hubungan antara nilai dasar bangsa dengan realitas sosial yang mereka hadapi, meskipun sebagian mahasiswa masih menganggap pembelajaran bersifat teoritis. Pemahaman mahasiswa semakin kritis ketika pembelajaran dikaitkan dengan isu aktual seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, cyberbullying, serta pelanggaran HAM di lingkungan pendidikan dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa relevansi Pendidikan Pancasila sangat dipengaruhi oleh pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan.

Meski demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya kesenjangan antara idealisme nilai Pancasila dengan praktik yang terjadi di lingkungan kampus. Mahasiswa menemukan bahwa realitas pendidikan masih menghadirkan ketidakadilan seperti perbedaan akses fasilitas, perlakuan yang tidak setara, dan pelanggaran etika antar individu. Faktor lingkungan sosial, media digital, dan pengalaman pribadi turut memengaruhi internalisasi nilai Pancasila pada diri mahasiswa. Oleh sebab itu, keberhasilan Pendidikan Pancasila tidak hanya bergantung pada materi yang diajarkan, tetapi juga pada lingkungan pendidikan dan budaya kampus yang mencerminkan nilai Pancasila dalam tindakan nyata.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pembelajaran Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dikembangkan menjadi lebih kontekstual, interaktif, dan berbasis kasus nyata. Dosen perlu mengintegrasikan isu HAM dan keadilan sosial secara lebih eksplisit melalui diskusi, simulasi, proyek sosial, dan refleksi pengalaman mahasiswa.

Institusi pendidikan juga perlu menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak dan martabat setiap mahasiswa agar nilai Pancasila tidak berhenti pada level kognitif, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam perilaku. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dapat berfungsi optimal dalam membentuk generasi muda yang humanis, kritis, dan bertanggung jawab sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, M. S. (2018). *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Abidin, Z. (2020). Implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 145–160.
- Darmawan, H. (2019). Pendidikan HAM dalam konteks perguruan tinggi. *Jurnal Civic Education*, 8(1), 55–67.
- Ramdhani, M. A. (2017). Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1), 25–34.
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: UPI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Syafruddin, M. (2021). Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Filsafat dan Politik*, 4(3), 112–125.
- Suyatno, T. (2020). Pendidikan karakter berbasis Pancasila di era digital. *Jurnal Humanika*, 15(1), 72–84.
- Nurdin, E. (2019). Pemikiran mahasiswa terhadap HAM dan keadilan sosial. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(4), 301–310.
- Budiyono, B. (2020). Tantangan internalisasi nilai Pancasila di pendidikan tinggi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2), 98–107.
- Setiawan, D. (2018). Peran pendidikan dalam memperkuat nilai kemanusiaan. *Jurnal Pendidikan Moral*, 12(2), 210–223.
- Nurhayati, F. (2022). Analisis sikap mahasiswa terhadap isu intoleransi dan HAM. *Jurnal Multikultural dan Pendidikan*, 14(1), 45–56